

# **RENCANA STRATEGIS**

**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2024 - 2026**



**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya jualah maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan rencana strategis perangkat daerah tahun 2024-2026 mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagaimana yang terdapat pada poin kesatu © bahwa menginstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh kepala PD untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Dokumen ini memuat tujuan, strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan dan disusun guna menyediakan tolak ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan

Akhirnya dengan disusunnya Renstra Tahun 2024-2026 semoga dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan selama 3 (Tiga) tahun. Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 – 2026 ini. Saran dan masukan dari semua pihak kami harapkan demi perbaikan yang lebih lanjut

Pangkajene Sidenreng, 30 Maret 2023

**KEPALA DINAS**

**Ir. SEMUEL K**

NIP. 19640317 199510 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2015-2019.....	19
2.3.2 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).....	27
2.4. Kelompok Sasaran Layanan .....	27
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
3.2. Isu Strategis.....	31
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1. Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 .....	33
4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah .....	34
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN..</b>	<b>41</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>56</b>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2022.....	15
Tabel 2.2. Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022.....	15
Tabel 2.3. Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Eselon Tahun 2022.....	16
Tabel 2.4. Aset Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang .....	16
Tabel 2.5.1 Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2020.....	20
Tabel 2.5.2 Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2020.....	22
Tabel 2.6.1 Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2019-2020.....	25
Tabel 2.6.2 Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2021-2023.....	26
Tabel 2.7. Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2015-2022 .....	27
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang .....	28
Tabel 3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Urusan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sidenreng Rappang.....	29
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026 .....	33
Tabel 4.2. Cascading Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikatornya .....	34
Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 .....	39
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026.....	44
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026 .....	51
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Kunci Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026 .....	52

DAFTAR GAMBAR

No.		Halaman
1.	Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang .....	14

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana strategi merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumberdaya termasuk modal dan sumberdaya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Penyusunan rencana strategis perangkat daerah tahun 2024-2026 mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagaimana yang terdapat pada poin kesatu © bahwa menginstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh kepala PD untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Peternakan dan Perikanan berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan/bidang. Berbeda dengan Renstra pada periode sebelumnya, maka Renstra tahun 2024-2026 hanya mengacu pada RPD Tahun 2024-2026.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2024 – 2026 memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tersebut. Renstra disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhatikan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Renstra Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali kedalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat rencana program dan kegiatan dalam kurun 1 (satu) tahun anggaran.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024 – 2026, mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 9437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipas Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 136);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1538);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);

- Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018– 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
- Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 44 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang terutama yang terkait dengan urusan Peternakan dan Perikanan. Selanjutnya renstra ini juga menjadi arahan dan acuan serta pedoman bagi Dinas Peternakan dan Perikanan bersama masyarakat dan *stakeholders* lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang peternakan dan perikanan selama periode tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung pelaksanaan amanat pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026.

Tujuan penyusunan renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

1. Menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Peternakan dan Perikanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang peternakan dan perikanan;
2. Menjabarkan kondisi dan prospek perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Merumuskan strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026;

4. Merumuskan rencana program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026.
5. Dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah
6. Dasar penyusunan RKA ( Rancangan Kerja Awal) Perangkat Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan renstra mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dengan demikian maka dokumen renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 -2026 disusun dengan sistematika seperti berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

###### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas tentang pengertian renstra, fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunannya, keterkaitan renstra dengan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang, renstra K/L dan renstra provinsi/kabupaten/kota serta dasar perubahan renstra

###### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

###### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan renstra.

###### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Peternakan dan Perikanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas

secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui renstra ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasinya, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan ringkas tentang berbagai jenis sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab II.

3.2. Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran PD yang penentuannya berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

4.2. Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, target, dan pagunya.

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini memuat :

- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD dan
- Penentuan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

#### **BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan di bidang Peternakan dan Perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Fungsi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perumusan kebijakan Tekhnis di Bidang Peternakan dan Perikanan, Pemberi dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang Peternakan dan Perikanan, Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Peternakan dan Perikanan, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri atas :

##### **a. Kepala Dinas**

Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Peternakan dan Perikanan yang menjadi Kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan adminitrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

**b. Sekretaris**

Tugas : Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Dinas.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**b.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Tugas : Mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan,serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

**b.2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Tugas : Mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum lingkungan dinas.

**c. Kepala Bidang Pembibitan dan Kesehatan Hewan**

Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembibitan dan kesehatan hewan.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Pembibitan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pembibitan dan kesehatan hewan.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pembibitan dan kesehatan hewan.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pembibitan dan kesehatan hewan.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan dan kesehatan hewan.

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**c.1 Kepala Bidang Pembiayaan dan Penyuluhan**

Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pembiayaan dan penyuluhan.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan operasional di bidang pembiayaan dan penyuluhan;
- b. Penyiapan Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembiayaan dan penyuluhan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan dan penyuluhan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan dan penyuluhan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

**d. Kepala Bidang Perikanan**

Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang Perikanan.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perikanan;
- c. Penyiapan bimbingan tekhnis dan supervisi dibidang perikanan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**e. Kelompok Jabatan Fungsional**

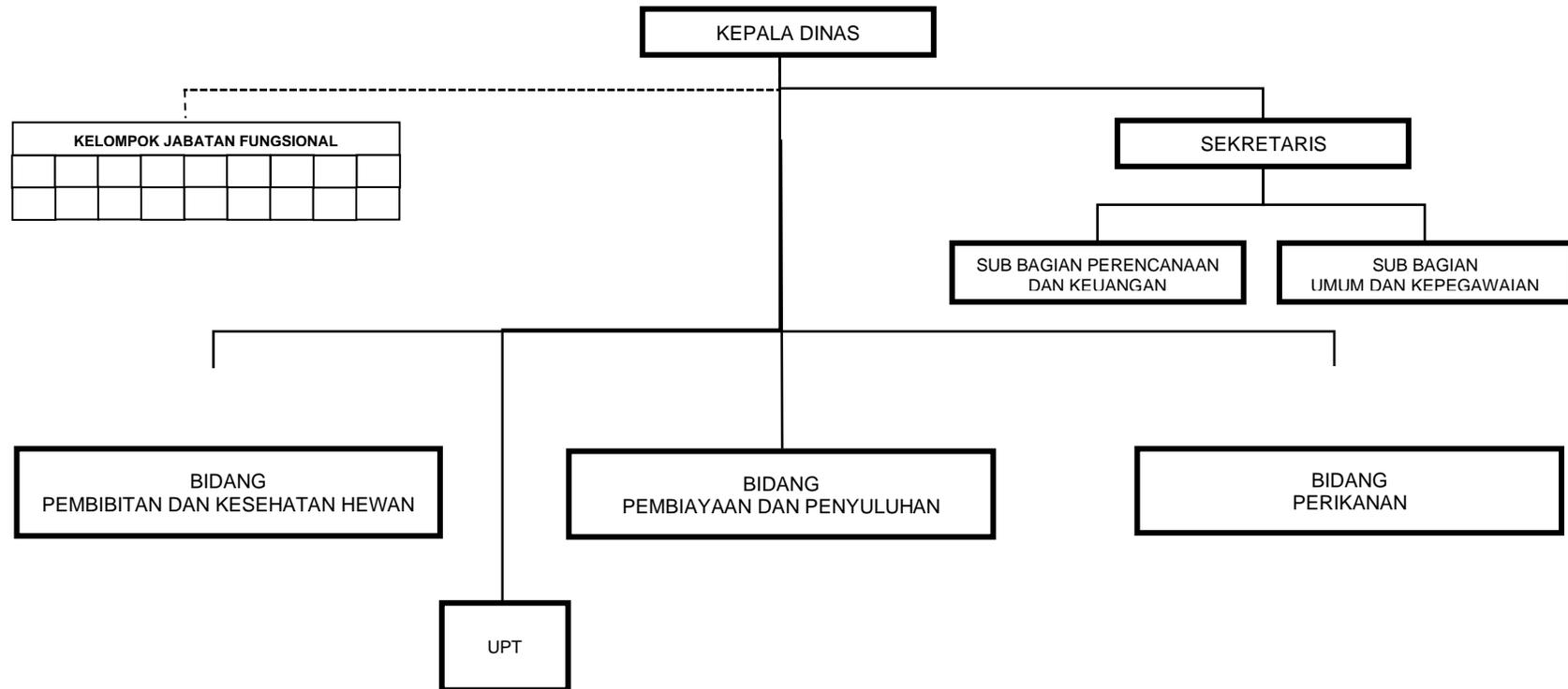
Tugas : Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan Kebutuhan.

Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pembibitan dan Kesehatan Hewan
4. Bidang Pembiayaan dan Penyuluhan
5. Bidang Perikanan
6. Jabatan Fungsional

**Struktur Organisasi  
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang  
(Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor**



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang

## 2.2. Sumberdaya

### a. Pangkat dan Golongan

Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan pangkat dan golongan ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2022

No	Pangkat / Golongan	Jenis Kelamin (Orang)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Madya, IV/d	-	-	-
2	Pembina Utama Muda, IV/c	5	2	7
3	Pembina Tk.I. IV/b	5	4	9
4	Pembina IV/a	7	6	13
5	Penata Tk. I, III/d	7	4	11
6	Penata, III/c	14	1	15
7	Penata Muda Tk.I, III/b	5	3	8
8	Penata Muda, III/a	5	9	14
9	Pengatur Tk. I, II/d	2	1	3
10	Pengatur, II/c	1	-	1
11	Pengatur Muda Tk. I, II/b	-	-	-
12	Pengatur Muda, II/a	1	-	1
13	Juru Tk I, I/d	-	-	-
	Jumlah	52	30	82

Ket: Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian Thn 2022

### b. Tingkat Pendidikan

Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Pendidikan	Jenis Kelamin (Orang)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Magister (S.2)	8	7	15
2	Magister (S.1)	29	24	53
3	D.IV	5	1	6
4	D.III	-	-	-
5	SLTA	7	1	8
6	SLTP	-	-	-
		49	33	82

Ket: Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian Thn 2022

**c. Eselon**

Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Eselon Tahun 2022

No	Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II.b	1	-	1
2	Eselon III.a	1	-	1
3	Eselon III.b	3	-	3
4	Eselon IV	2	4	6
5	Staf	7	7	14
6	Fungsional	24	33	57
		38	44	82

Ket: Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian Thn 2022

Selain personil aparatur, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki sejumlah aset. Aset yang dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4. Aset Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Jenis Aset		Jumlah	Keterangan
<b>1</b>	<b>TANAH</b>			
	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	APBD, Hibah
	2	Tanah Untuk Pengembangan Peternakan	3	
	3	Tanah Untuk Pengembangan Perikanan	5	
	4	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	
<b>2.</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>			
	1	Alat Angkutan		
		Kendaraan Roda 4	4	APBD
		Kendaraan Roda 2	80	
		Kendaraan Roda 3	4	
		Alat Angkut Air	17	
		Air Blower	4	
		Mesin Pembuat Pelet	5	
	2	Alat Peternakan/Perikanan		
		<b>Alat Peternakan</b>		
		Insemination Gun	13	
		Gunting Plat tangan	21	
		Alat Peternakan lainnya	13	
		<b>Alat Perikanan</b>		
		Keramba Jaring	3	

No	Jenis Aset	Jumlah	Keterangan
	Ph Meter	1	
	GPS	3	
	Timbangan	5	
	Traktor tangan	3	
	Alat pengering	1	
	Soil tester	5	
	Alat laboritorium	2	
	Alat pasca panen	2	
	KJA	3	
	Hapa	1	
	Bak Fiberglas	18	
	Bak Aquarium	4	
	Bak Blower	8	
	Kabel Roll	2	
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	15	
	Laptop	2	
	Note book	14	
	AC Central	1	
	AC Split	4	
	TV	2	
	PC Unit	2	
	Monitor	1	
	Printer	10	
	Portable Hard Disk	6	
	Handycam	1	
	Sound System	2	
	Camera Elektronik	2	
	Power Aplifier	1	
	Stabiliting amplifier	1	
	Alat komunikasi radio lainnya	2	
	Reach In Freezer	2	
	Mesin Ketik Standar	4	
	Mesifn Pemotong rumputf	10	
	Mesin Jahit	1	
	Mesin Genset	5	
	Filling Kabinet Besi	2	
	Brankas	1	
	Lemari Besi	3	
	Lemari Kaca	8	
	Lemari Kayu	13	
	Lemari Es	6	
	Meja Rapat	18	
	Kursi Kayu	3	
	Kursi Rapat	100	
	Kursi Kerja Pejabat	5	
	Tempat Tidur Kayu	18	

No	Jenis Aset	Jumlah	Keterangan
	Meja Keraj Pejabat	7	
	Meja komputer	2	
	Meja Kerja Kayu	23	
	Pompa Air	25	
	Tandon Air	11	
	Alat Pelindung	1	
	Pelampung	30	
5	Alat Laboraturium		
	Timbangan / Nerac	5	
	Microccope dengan Camera	1	
	Tangki Liqid Nitrogen	1	
	Carrying case	1	
	Bunsen Burner dan kelengkapannya	4	
	Hammer Mil	1	
	Countainer N2 Cair	2	
	Alat laboratorium biologi perairan	2	
	Alat laboratorium lainnya	4	
	DO Meter	5	
	Plankton net	28	
6	Alat Kedokteran		
	Alat Kedokteran Umum	10	
<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		
	Bangunan Gedung kantor perumahan	14	
	Bangunan Gedung kantor lain-lain	2	
	Bangunan kantor tertutup	6	
	Bangunan Gedung	2	
	Bangunan Gedung lain-lain	2	
	Bangunan Gedung Laboratorium permanen	1	
	Bangunan gedung pertemuan permanen	2	
	Gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen	1	
	Gedung Pos jaga permanen	4	
	Gedung pemotong hewan	1	
	Bangunan untuk Kandang	10	
	Bangunan gedung tempat kerja lainnya	15	
	Bangunan tempat kerja lain-lain	8	
	Mess/ wisma/bangunan	4	
	Pagar	11	
<b>4</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>		
	Jalan khusus kompleks	12	
	Jembatan khusus lain-lain	1	
	Sumur dengan Pompa	2	
	Saluran induk	3	
	Bangunan Pembawa irigasi	1	
	Bangunan pintu airf	10	

No	Jenis Aset		Jumlah	Keterangan
		Waduk pasang surut	1	
		Saluran tersier pembuangan	1	
		Bangunan pemasuka/pembuangan	27	
		Kolam pasang surut	49	
		Saluran tersier	1	
		Bangunan pembuangan pengaman sungai	1	
		Sumur artesis	4	
		Bangunan box tersier	1	
		SCL	1	
		Jaringan Transmisi lain-lain	1	
<b>5</b>	<b>Aset Lainnya</b>			
	2	Binatang Ikan	14	

## 2.3. Kinerja Pelayanan

### 2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2018 - 2022

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dari segi kinerja pelayanan dan penganggaran sejak Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.1 Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Realisasi Capaian Tahun ke...		Target Renstra SKPD Tahun ke...			Rasio Capaian pada Tahun ke...		
			2019	2020	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai Hasil Evaluasi Sakip	A	-	-	B	BB	A	-	-	-
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC	CC	-	-	-	-	-	-	-
3	Sapi (Ekor)	73.091	2.564	359.947	-	-	-	0%	0%	0%
4	Kambing (Ekor)	15.083	-123	6.019	-	-	-	0%	0%	0%
5	Ayam buras (Ekor)	2.282.474	541.335	565.753	-	-	-	0%	0%	0%
6	Ekor hasil IB	-	4.235	-	-	-	-	0%	0%	0%
7	Terkendalnya Penyakit Menular Ternak 0,4 - 0,6% untuk mendukung pengembangan populasi ternak	-	7140	-	-	-	-	0%	0%	0%
8	Jumlah Kelompok Hasil produksi Peternakan (Klp)	11	2	-	-	-	-	0%	0%	0%
9										
10	Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	5,22	5,41	4,24	4,18	4,19	4,2	129%	101%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Realisasi Capaian Tahun ke...		Target Renstra SKPD Tahun ke...			Rasio Capaian pada Tahun ke...		
			2019	2020	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Produksi perikanan budidaya (Ton)	806,8	669,7	567,3	1.350,00	1.365,00	1.380,00	50%	42%	0%
12	Produksi perikanan tangkap (Ton)	6.944,00	2.589,40	2.804,30	2.856,27	2.913,40	2.971,60	91%	96%	0%
13	Jumlah Ikan yang ditebar (Ekor)	4.128.450	195.000	378.000	-	-	-	0%	0%	0%
14	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	0,63	0,64	1,21	1,34	1,35	1,35	48%	90%	0%

Tabel 2.5.2 Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Realisasi Capaian Tahun ke...			Target Renstra SKPD Tahun ke...			Rasio Capaian pada Tahun ke...		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai Hasil Evaluasi Sakip	A	B	B	-	B	BB	A	B	BB	-
2	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	0%
3	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	0%
4	Cakupan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	0%
5	Cakupan layanan Administrasi Umum Perangkat daerah	-	75%	100%	-	100%	100%	100%	75%	100%	0%
6	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	75%	100%	-	100%	100%	100%	75%	100%	0%
7	cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	-	75%	100%	-	100%	100%	100%	75%	100%	0%
8	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	-	100%	94%	-	100%	100%	100%	100%	94%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Realisasi Capaian Tahun ke...			Target Renstra SKPD Tahun ke...			Rasio Capaian pada Tahun ke...		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	0%
10	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha Perikanan	-	100%	90%	-	70%	70%	70%	143%	129%	0%
11	Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (Org	-	303	309	-	294	294	294	103%	105%	0%
12	Jumlah produksi daging (Kg)	-	2.750.266	1.510.999	-	3.212.708	3.348.198	3.570.791	52%	28%	0%
13	Jumlah Produksi Telur (Kg)	-	49.903.530	44.265.103	-	54.997.045	56.822.770	58.717.333	91%	78%	0%
14	Persentase Akseptor yang dilayani	-	9,20%	10%	-	10%	10%	10%	92%	100%	0%
15	Persentase Ternak yang disebar	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	0%
16	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	-	0%	100%	-	100%	100%	100%	0%	100%	0%
17	Cakupan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian.	-	0%	100%	-	100%	100%	100%	0%	100%	0%
18	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-	21%	21%	-	21%	21%	21%	100%	100%	0%
19	Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis	-	20%	20%	-	20%	20%	20%	100%	100%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Realisasi Capaian Tahun ke...			Target Renstra SKPD Tahun ke...			Rasio Capaian pada Tahun ke...		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Perentase Unit Usaha Hewan dan Produk yang Memenuhi Persyaratan Kesmavet	-	0%	50%	-	75%	75%	75%	0%	67%	0%
21	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	-	104%	100%	-	100%	100%	100%	104%	100%	0%
22	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan	-	104%	100%	-	100%	100%	100%	104%	100%	0%
23	Rasio Penyuluh Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/Kelompok Ternak	-	1:14	1:13	-	1:13	1:13	1:13	101%	100%	0%
24	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	0%
25	Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	5,22	4,24	4,17	-	4,18	4,19	4,2	101%	100%	0%
26	Produksi perikanan budidaya (Ton)	806,8	687,135	1.465,03	-	1.350,00	1.365,00	1.380,00	51%	107%	0%
27	Produksi perikanan tangkap (Ton)	6.944,00	1.995,40	2.591,10	-	2.856,27	2.913,40	2.971,60	70%	89%	0%
28	Jumlah Ikan yang ditebar (Ekor)	4.128.450	378.000	300.000	-	-	-	-	0%	0%	0%
29	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	0,63	1,21	1,34	-	1,34	1,35	1,35	90%	99%	0%

**Tabel 2.6.1 Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020**

PROGRAM	Anggaran pada Tahun ke ...		Realisasi Anggaran pada Tahun ke ....		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke ...		Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	445.282.000	-	427.344.568	-	96	-	-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	47.808.000	-	28.707.824	-	60	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	10.207.000	-	12.653.000	-	124	-	-
Program Peningkatan Produksi Perikanan	-	4.880.017.000	-	2.058.249.400	-	42	-	-
Program peningkatan produksi peternakan	-	840.529.000	-	890.510.825	-	106	-	-

**Tabel 2.6.2 Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023**

PROGRAM	Anggaran pada Tahun ke ...			Realisasi Anggaran pada Tahun ke ....			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke ...			Rata - Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	4	5	6	9	10	11	14	15	16	17	18
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	831.222.000	495.338.000	500.291.380	788.059.200	193.332.800	-	95	39	-	(110.310.207)	(198.242.133)
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	984.742.000	425.382.000	429.635.820	1.085.518.775	571.825.150	-	110	134	-	(185.035.393)	(171.231.208)
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	126.006.000	37.915.000	38.294.150	146.004.000	14.037.750	-	116	37	-	(29.237.283)	(43.988.750)
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.500.757.000	1515764570	3.486.336.570	1.269.649.825	2.103.896.902	-	85	139	-	661.859.857	278.082.359
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	1.198.825.000	1.210.813.250	-	2.006.617.902	-	-	167	-	403.604.417	668.872.634
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	150.000.000	362.510.000	366.135.100	116.377.900	411.902.500	-	78	114	-	72.045.033	98.508.200
Program Perizinan Usaha Pertanian	109.835.000	13.665.000	13.801.650	33.447.700	250.318.950	-	30	1.832	-	(32.011.117)	72.290.417
Program Penyuluhan Pertanian	60.000.000	67.168.000	67.839.380	28.515.900	11.528.250	-	48	17	-	2.613.127	(5.662.550)
Program Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	7.419.765.000	7.779.779.390	7.857.577.185	176.335.825	7.935.911.296	-	2	102	-	145.937.395	2.586.525.157

### 2.3.2 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tingkat capaian kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) tahun 2018-2022 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut :

No	PILAR EKONOMI (Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)		satuan	Capaian								Target				Permasalahan (Analisis)	
	No.Indi	INDIKATOR		CP 2015	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	2023	2024	2025	2026		
1	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	%	-	-	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	%	-	52	54	55	58	57	110,9	121,9	134	134	147	161,7	+ 10 % / Thn	
3	14.b.1. (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Orang	-	-	-	156	18	-	-	-	-	-	-	-	Terbatasnya anggaran untuk pemberian asuransi kepada nelayan	

Tabel 2.7. Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2015-2022

### 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Ada beberapa kelompok yang menjadi sasaran layanan berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu

- Kelompok masyarakat peternak
- Kelompok masyarakat pembudidaya ikan
- Kelompok masyarakat nelayan

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan bidang peternakan dan perikanan yang telah dilaksanakan menggambarkan layanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang senantiasa menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, perhatian atas mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak dapat diabaikan. Isu yang diuraikan menjelaskan suatu keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan memberikan dampak yang signifikan di masa datang dan akan berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang di masa tiga tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan yaitu urusan pemerintahan bidang peternakan dan bidang perikanan.

Berikut ini diuraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Permasalahan Per Urusan	Data/ Analisis pendukung
I.	<b>Urusan Bidang Kelauan dan Perikanan</b>	
1	Rendahnya kapasitas kelembagaan dan SDM peternak, pembudidaya dan nelayan	Dibutuhkan kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan dan magang bagi SDM.
2	Terbatasnya akses peternak, pembudidaya dan nelayan terhadap permodalan	Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh peternak dan pembudidaya adalah kurangnya modal usaha sehingga diperlukan peranan dari pihak terkait agar bisa diberi kemudahan dalam hal permodalan.
3	Rusaknya lingkungan dan ekosistem danau	Keberlangsungan hidup ekosistem yg ada di Danau ditentukan oleh kondisi lingkungan disekitar. Kondisi lingkungan yang tidak baik mengakibatkan kerusakan ekosistem yang ada sehingga dapat mengakibatkan turunnya produksi perikanan.

No.	Permasalahan Per Urusan	Data/ Analisis pendukung
4	Belum optimalnya perlindungan sumber daya ikan	- Pengelolaan perikanan tangkap bertujuan untuk mewujudkan usaha perikanan tangkap yang berkelanjutan. Untuk itu, laju penangkapan ikan harus tidak melebihi potensi produksi lestari (Maximum Sustainable Yield, MSY) dari sumber daya ikan dalam suatu wilayah perairan - Perda No. 4 Tahun 2010 (Pengelolaan Sumberdaya Perikanan pada Perairan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang)
<b>II.</b>	<b>Urusan Bidang Pertanian</b>	
1	Produktifitas usaha peternakan terutama produk ayam petelur mengalami penurunan	Peningkatan Kegiatan Vaksinasi dan Biosecurity sesuai SOP
2	Fluktuasi harga komoditas peternakan	
3	Belum optimalnya produksi dan produktifitas peternakan	- Peningkatan fungsi sarana dan prasarana kesehatan ternak,
4	Belum optimalnya perlindungan pemotongan betina produktif	Perda No 4 Tahun 2016 (Pengendalian Penyembelihan Ternak Betina Produktif)

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat tiga aspek yang menjadi dasar penentuan permasalahan yaitu pelayanan perangkat daerah, arahan RTRW dan arahan KLHS. Selanjutnya analisis permasalahan yang berhubungan atau mempengaruhi pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan bidang urusan seperti termuat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Urusan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
I	<b>Kelautan dan Perikanan</b>			
1	Produksi Perikanan	Melampaui (>)	Kurangnya prasarana Terjadinya sedimentasi dan pendangkalan perairan yang memadaierjadinya	Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
2	Konsumsi Ikan	Belum Tercapai (<)	Bergesernya pola konsumsi masyarakat dari produk perikanan ke produk peternakan	Ketersediaan ikan dan pola konsumsi masyarakat
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Belum Tercapai (<)	Terbatasnya alokasi anggaran untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok nelayan	Alokasi anggaran untuk pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Belum Tercapai (<)	Minimnya sarana penangkapan ikan yang memadai	Ketersediaan Sarana Penangkapan Ikan Yang Memadai

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			Adanya spesies baru (ikan sapu-sapu) yang mempengaruhi aktifitas penangkapan ikan	Penanganan yang tepat terhadap ikan sapu-sapu
			Menurunnya produktifitas danau	Penanganan pencemaran dan sedimentasi di danau serta peningkatan kegiatan restocking
<b>II</b>	<b>Pertanian</b>			
1	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Belum Tercapai (<)	Terbatasnya pengadaan vaksin, obat-obatan dan biaya operasional petugas	1. Vaksinasi Massal 2. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
2	Produksi daging	Belum Tercapai (<)	Adanya beberapa kasus penyakit	Peningkatan manajemen kesehatan (biosecurity)
			Belum maksimalnya program IB	Peningkatan tingkat adopsi peternak terhadap teknologi IB
			Menurunnya jumlah populasi ternak	Peningkatan pemanfaatan lahan penggembalaan dan HMT
			Pemotongan betina produktif	Sosialisasi pelarangan pemotongan betina produktif
			Sistem pemeliharaan belum intensif	KIE cara pemeliharaan secara intensif
3	Produksi telur	Belum Tercapai (<)	Jumlah dan kualitas DOC rendah	Memaksimalkan manajemen indukan/parentstock
			Biaya produksi tinggi	Penyediaan pakan yang berkualitas oleh pabrik pakan lokal
			Kualitas pullet belum maksimal	Peningkatan manajemen pemeliharaan
			Adanya penyakit ternak	Peningkatan manajemen kesehatan/biosecurity

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa ada 1 indikator yang melampaui target dan 6 (enam) indikator yang belum mencapai target.

### 3.2. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan peternakan dan perikanan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan peternakan dan perikanan karena dampaknya signifikan di masa mendatang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dapat diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan permasalahan dan hasil telaahan yang telah dilakukan, maka isu-isu untuk bidang Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup aspek seperti: 1) peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan; 2) harga sarana produksi peternakan dan perikanan; 3) kelembagaan pelaku usaha peternakan dan perikanan; 4) terbatasnya permodalan. Isu-isu strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. *Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan***

Kondisi produktivitas komoditas peternakan dan perikanan yang diproduksi oleh peternak dan pembudidaya di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi peternakan dan perikanan. Selanjutnya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan dan perikanan, maka dikembangkan pula hilirisasi komoditas peternakan dan perikanan strategis. Hilirisasi mencakup kegiatan peternakan dan perikanan secara terpadu mulai dari pengolahan sampai penanganan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan.

Selain itu, sebagian besar produksi peternakan dan perikanan masih belum mampu mencapai standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun

ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip *Good Agriculture Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP), serta mendorong peternak dan pembudidaya agar menerapkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan.

## **2. Harga Sarana Produksi Peternakan dan Perikanan**

Pendapatan petani ternak, pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah produk hasil peternakan dan perikanan sangat ditentukan oleh input berupa biaya-biaya produksi (sarana produksi). Adanya kecenderungan harga sarana produksi semakin meningkat dengan fluktuasi tinggi yang berakibat pada semakin tingginya biaya produksi dan semakin menurunnya keuntungan dan pendapatan.

## **3. Kelembagaan Pelaku Usaha Peternakan dan Perikanan**

Kelembagaan pelaku usaha peternakan dan perikanan saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan untuk pengembangan usaha.

## **4. Terbatasnya Permodalan**

Belum adanya kebijakan tentang kredit murah dan lunak untuk mendukung usaha ternak, budidaya perikanan ataupun perikanan tangkap sehingga produk yang dihasilkan tidak bisa bersaing dengan produk luar baik secara kualitas maupun kuantitas. Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarakat petani ikan, peternak dan nelayan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok dan diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani, peternak dan nelayan.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Peternakan dan Perikanan dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan menjadi sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Tujuan pembangunan Peternakan dan Perikanan periode 3 (tiga) tahun kedepan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan produktivitas sub sektor peternakan dan perikanan

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka lima tahun ke depan adalah

1. Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan
2. Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja jangka menengah Dinas Peternakan dan Perikanan selama 3 (tiga) tahun ke depan di uraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026

#### Cascading Rancangan Renstra

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2021/2022	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
						2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5		6	7	8	
1	Meningkatkan produktivitas sub sektor Peternakan		Kontribusi subsektor peternakan terhadap PDRB	(%)	4,03	6,04	4,18	4,19	4,2
		Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	(%)	-	-	3,3	3,3	3,4
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai sakiP	(%)	60(B)	80(A)	70 (B)	80 (BB)	80 (A)
2	Meningkatkan produktivitas sub sektor Perikanan		Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	(%)	1,2	3,6	1,35	1,35	1,35
		Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	(%)	-	-	1,3	1,3	1,3

#### 4.2. Cascading kinerja Perangkat Daerah

Penjabaran dan penyelarasan Tujuan, Sasaran strategis, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.2. CASCADING TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERSERTA INDIKATORNYA

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
<b>TUJUAN 1 OPD</b> : Meningkatkan Produktivitas subsektor Perikanan <b>INDIKATOR :</b> Kontribusi Perikanan Terhadap PDRB	<b>SASARAN 1 OPD :</b> Meningkatnya produksi hasil perikanan <b>INDIKATOR :</b> : Persentase peningkatan produksi perikanan	<b>PROGRAM 1 :</b> Program Pengelolaan Perikanan Tangkap <b>INDIKATOR :</b> Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton)	<b>KEGIATAN 1 :</b> Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota <b>INDIKATOR :</b> Persentase Produksi Perikanan(%)	<b>SUB KEGIATAN 1 :</b> Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap <b>INDIKATOR :</b> Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)
				<b>SUB KEGIATAN 2 :</b> Penjaminan Ketersediaan sarana Perikanan Tangkap <b>INDIKATOR :</b> Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)
			<b>KEGIATAN 2 :</b> Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota <b>INDIKATOR :</b> Cakupan Wilayah Pemberdayaan Nelayan Kecil (%)	<b>SUB KEGIATAN 1 :</b> Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil <b>INDIKATOR :</b> Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)
		<b>PROGRAM 2 :</b> Program Pengelolaan Perikanan Budidaya <b>INDIKATOR :</b> Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton)	<b>KEGIATAN 1 :</b> Pengelolaan Pembudidayaan Ikan <b>INDIKATOR :</b> Persentase Produksi Perikanan Budidaya(%)	<b>SUB KEGIATAN 1 :</b> Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota <b>INDIKATOR :</b> Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)
				<b>SUB KEGIATAN 2 :</b> Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota <b>INDIKATOR :</b> Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		<b>PROGRAM 3</b> : Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan <b>INDIKATOR</b> : Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%)	<b>KEGIATAN 1</b> : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota <b>INDIKATOR</b> : Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (Org)	<b>SUB KEGIATAN 1</b> : Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota <b>INDIKATOR</b> : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)
<b>TUJUAN 2 OPD</b> : Meningkatkan Produktivitas subsektor Peternakan <b>INDIKATOR</b> : Kontribusi Peternakan Terhadap PDRB	<b>SASARAN 2 OPD</b> : Meningkatnya produksi Peternakan <b>INDIKATOR</b> : Persentase peningkatan produksi peternakan	<b>PROGRAM 1</b> : Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian <b>INDIKATOR</b> : Jumlah Produksi Daging dan Telur	<b>KEGIATAN 1</b> : Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota <b>INDIKATOR</b> : Persentase Akseptor Yang Dilayani (%)	<b>SUB KEGIATAN 1</b> : Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman <b>INDIKATOR</b> : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (dokumen)
			<b>KEGIATAN 2</b> : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota <b>INDIKATOR</b> : Persentase Ternak Yang Disebar (%)	<b>SUB KEGIATAN 1</b> : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain <b>INDIKATOR</b> : Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ekor)
		<b>PROGRAM 2</b> : Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian <b>INDIKATOR</b> : Presentase ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	<b>KEGIATAN 1</b> : Pembangunan Prasarana Pertanian <b>INDIKATOR</b> : Cakupan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian (%)	<b>SUB KEGIATAN 1</b> : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya <b>INDIKATOR</b> : Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun, direhab dan dipelihara (Unit)
		<b>PROGRAM 3</b> : Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner <b>INDIKATOR</b> : Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	<b>KEGIATAN 1</b> : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota <b>INDIKATOR</b> : Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis (%)	<b>SUB KEGIATAN 1</b> : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis <b>INDIKATOR</b> : Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)
			<b>KEGIATAN 2</b> : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner <b>INDIKATOR</b> : Pesentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang Memenuhi persyaratan Teknis Kesmavet (%)	<b>SUB KEGIATAN 1</b> : Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan <b>INDIKATOR</b> : Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (Laporan)

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		<b>PROGRAM 4</b> :Program Perizinan Usaha Pertanian <b>INDIKATOR</b> : Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan (%)	<b>KEGIATAN 1</b> : Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasiitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan <b>INDIKATOR</b> : Cakupan Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan (%)	<b>SUB KEGIATAN 1</b> : Penatausahaan Penerbitan izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan <b>INDIKATOR</b> : Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)
		<b>PROGRAM 5</b> : Program Penyuluhan Pertanian <b>INDIKATOR</b> :Rasio Penyuluhan Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/Kelompok Ternak	<b>KEGIATAN 1</b> : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian <b>INDIKATOR</b> : Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh (%)	<b>SUB KEGIATAN 1</b> : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa <b>INDIKATOR</b> : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)
				<b>SUB KEGIATAN 2</b> : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa <b>INDIKATOR</b> : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)
	<b>SASARAN 3 OPD</b> : Meningkatnya Tata kelola Kinerja dan Keuangan <b>INDIKATOR</b> : Predikat Nilai Sakip	<b>PROGRAM 1</b> : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <b>INDIKATOR</b> : Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>KEGIATAN 1</b> : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <b>INDIKATOR</b> :Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	<b>SUB KEGIATAN 1</b> : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah <b>INDIKATOR</b> :Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				<b>SUB KEGIATAN 2</b> : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD <b>INDIKATOR</b> : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			<b>KEGIATAN 2</b> : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <b>INDIKATOR</b> :Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>SUB KEGIATAN 1</b> : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN <b>INDIKATOR</b> :Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				<p><b>SUB KEGIATAN 2</b> : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</p> <p><b>INDIKATOR</b> :Jumlah Laoran Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</p>
			<p><b>KEGIATAN 3</b> : Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p><b>INDIKATOR</b> :Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p><b>SUB KEGIATAN 1</b> :Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p><b>INDIKATOR</b> :Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASNJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</p>
				<p><b>SUB KEGIATAN 1</b> :Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p><b>INDIKATOR</b> :Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</p>
				<p><b>SUB KEGIATAN 1</b> :Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p><b>INDIKATOR</b> :Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>
			<p><b>KEGIATAN 4</b> : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p><b>INDIKATOR</b> :Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p><b>SUB KEGIATAN 1</b> :Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p><b>INDIKATOR</b> :Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p>
				<p><b>SUB KEGIATAN 2</b> :Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p><b>INDIKATOR</b> :Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</p>
				<p><b>SUB KEGIATAN 3</b> :Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p><b>INDIKATOR</b> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</p>

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				<b>SUB KEGIATAN 4</b> :Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <b>INDIKATOR</b> :Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
			<b>KEGIATAN 5</b> : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <b>INDIKATOR</b> :Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Deaerah	<b>SUB KEGIATAN 1</b> :Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan <b>INDIKATOR</b> :Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				<b>SUB KEGIATAN 2</b> :Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <b>INDIKATOR</b> :Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				<b>SUB KEGIATAN 3</b> :Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <b>INDIKATOR</b> : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah berisikan perencanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus di pedomani Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang. Strategi dan arah kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026.

No.	Rancangan Renstra PD				
	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
1	<p><b>Tujuan :</b> Meningkatkan Produktivitas subsektor Perikanan</p> <p><b>Sasaran :</b> Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap PDRB (%)</p>	Meningkatkan daya saing produk peternakan dan perikanan dengan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan	Pemenuhan sarana dan prasarana produksi perikanan	Penguatan kelembagaan pelaku usaha	Penguatan daya saing produk berbasis inovasi pada proses agroindustri
2	<p><b>Tujuan :</b> Meningkatkan Produktivitas subsektor Peternakan</p> <p><b>Sasaran :</b> Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap PDRB (%)</p>	Meningkatkan daya saing produk peternakan dan perikanan dengan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan	Pemenuhan sarana dan prasarana produksi peternakan	Penguatan kelembagaan pelaku usaha	Penguatan daya saing produk berbasis inovasi pada proses agroindustri

Arah kebijakan pembangunan daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan tiga tahun kedepan. Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran RPD. Dengan prioritas kebijakan tersebut tidak berarti program/kegiatan pembangunan operasional OPD selain yang diprioritaskan tidak berjalan, ia

tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategi yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategi lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Program Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana program prioritas beserta indicator keluaran program per pagu sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD, yang selanjutnya dijabarkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Peternakan dan Perikanan selama kurun waktu 2024–2026 akan dilaksanakan sesuai dengan cakupan masing-masing program yang telah ditentukan. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing program sebagai berikut:

#### I. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatannya adalah :

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

#### II. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatannya adalah :

1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota

**III. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Kegiatannya adalah :

1. Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

**IV. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Kegiatannya adalah :

1. Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Miroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

2. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

**V. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Kegiatannya adalah :

1. Penjaminan Ketersediaan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

2. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

**VI. Program Perizinan Usaha Pertanian**

Kegiatannya adalah :

1. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

**VII. Program Penyuluhan Pertanian**

Kegiatannya adalah :

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

**VIII. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatannya adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan produktivitas subsektor Perikanan				Kontribusi Subsektor perikanan terhadap PDRB (%)	1	1,26	1,35		1,36		1,37		4,08		
	Meningkatnya produksi hasil perikanan			Persentase peningkatan produksi perikanan(%)	-	-	1,30		1,30		1,30		3,90		
		3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton)	2.591	2.800,28	2.856,27	230.000.000	2913,40	503.000.000	2971,60	530.200.000	8.741,27	1.263.200.000	
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produksi Perikanan(%)	94	100	100	190.000.000	100	458.000.000	100	480.200.000	100	1.128.200.000	
		3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	1	2	-	-	0	-	0	-	-	-	
		3.25.03.2.01.02	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	113	515	200	190.000.000	410	458.000.000	410	480.200.000	1.020	1.128.200.000	
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Pemberdayaan Nelayan Kecil (%)	-	100	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	135.000.000	
		3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Yang Mengikuti Pelatihan (orang)	-	40	40	40.000.000	40	45.000.000	40	50.000.000	120	135.000.000	
		3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton)	1.465	673,72	1.350	274.000.000	1365	400.000.000	1380	500.000.000	4.095	1.174.000.000	
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Produksi Perikanan Budidaya(%)	228	100	100	274.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	1.174.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3.25.0 4.2.04 .02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3	12	15	234.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	39	684.000.000	
		3.25.0 4.2.04 .03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	10	10	12	40.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	36	490.000.000	
		3.25.0 5	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan(%)	90	75	75	20.000.000	75	25.000.000	75	30.000.000	225	75.000.000	
		3.25.0 5.2.01	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (Org)	309	294	294	20.000.000	294	25.000.000	294	30.000.000	882	75.000.000	
		3.25.0 5.2.01 .01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	4	4	20.000.000	4	25.000.000	4	30.000.000	12	75.000.000	
Meningkatkan produktivitas subsektor Peternakan				Kontribusi peternakan terhadap PDRB (%)	4,03	6,04	4		4,29		4		12,77	-	
	Meningkatnya produksi peternakan			Persentase peningkatan produksi peternakan(%)	-	-	3,30		3,30		3,40		10,00	-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3.27.0 2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Daging(Kg)	1.510.999	5.358.011	3.212.708	200.000.000	3.348.198	1.455.500.000	3.570.791	1.532.000.000	15.489.708	3.187.500.000	
	Jumlah Produksi Telur (Kg)			44.265.103	83.362.100	54.997.045	56.822.770		58.717.333		170.537.148				
		3.27.0 2.2.02	Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Akseptor Yang Dilayani(%)	10	10	10	100.000.000	10	410.000.000	10	432.000.000	10	942.000.000	
		3.27.0 2.2.02 .02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (dokumen)	-	12	12	100.000.000	12	410.000.000	12	432.000.000	36	942.000.000	
		3.27.0 2.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ternak Yang Disebar(%)	279,61	100,00	100	100.000.000	100	1.045.500.000	100	1.100.000.000	100	2.245.500.000	
		3.27.0 2.2.06 .01	Pengadaan Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ekor)	32.225	2.000	2.000	100.000.000	5000	1.045.500.000	5500	1.100.000.000	12.500	2.245.500.000	
		3.27.0 3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Presentase ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	100	-	100	10.000.000	100	1.045.500.000	100	1.100.000.000	100	2.155.500.000	
		3.27.0 3.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian (%)	100	-	100	10.000.000	100	1.045.500.000	100	1.100.000.000	100	2.155.500.000	
		3.27.0 3.2.02 .09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun, direhab dan dipelihara (Unit)	1	-	1	10.000.000	1	1.045.500.000	1	1.100.000.000	2	2.155.500.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah		Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	21	21	21	253.575.000	21	380.000.000	21	440.000.000	21	1.073.575.000	
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis(%)	20	20	20	250.575.000	20	350.000.000	20	400.000.000	20	1.000.575.000	
		3.27.04.2.01.01	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis (Laporan)	-	11	11	250.575.000	11	350.000.000	11	400.000.000	33	1.000.575.000	
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Pesyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Kesmavet(%)	75	75	75	3.000.000	75	30.000.000	75	40.000.000	75	73.000.000	
		3.27.04.2.04.01	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	-	4	4	3.000.000	4	30.000.000	4	40.000.000	12	73.000.000	
		3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan(%)	252	100	100	1.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	46.000.000	
		3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan (%)	252	100	100	1.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	46.000.000	
		3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	126	75	125	1.000.000	150	20.000.000	175	25.000.000	450	46.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Rasio Ketersediaan Penyuluh Peternakan dan Rumah Tangga Peternak	1:13	1:13	1:11	6.500.000	1:14	40.000.000	1:13	40.000.000	1:13	86.500.000	
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh(%)	100	100	100	6.500.000	100	40.000.000	100	40.000.000	300	86.500.000	
		3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	-	11	11	3.500.000	11	20.000.000	11	20.000.000	33	43.500.000	
		3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	-	921	921	3.000.000	921	20.000.000	921	20.000.000	2.763	43.000.000	
Meningkatkan produktivitas subsektor Perikanan				Kontribusi Subsektor perikanan terhadap PDRB (%)	1	1,26	1,35		1,36		1,37		4,08		
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	BB		Predikat Nilai Sakip	60(B)	80(A)	70 (B)		80(BB)		80(A)		80(A)	-	
		1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	7.685.264.059	100	9.739.256.800	100	10.633.482.480	100	28.908.003.339	
		1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah(%)	100	100	100	22.000.000	100	25.000.000	100	28.000.000	100	75.000.000	
		1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	6	18.000.000	6	23.000.000	6	26.000.000	18	67.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	5	4.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	15	8.000.000	
		1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah(%)</b>	100	100	100	7.292.599.059	100	8.782.256.800	100	9.663.482.480	100	25.738.338.339	
		1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	79	1.330	7.289.599.059	1.400	8.762.256.800	1.400	9.638.482.480	1.400	25.690.338.339	
		1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	1	12	3.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	36	48.000.000	
		1.8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)</b>	100	100	100	294.165.000	100	362.000.000	100	362.000.000	100	1.018.165.000	
		1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12	12	500.000	12	6.000.000	12	6.000.000	36	12.500.000	
		1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12	12	48.265.000	12	96.000.000	12	96.000.000	36	240.265.000	
		1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	12	12	1.500.000	12	10.000.000	12	10.000.000	36	21.500.000	
		1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12	12	243.900.000	12	250.000.000	12	250.000.000	36	743.900.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)	100	100	100	27.000.000	100	430.000.000	100	440.000.000	100	897.000.000	
		1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21	28	50	1.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	150	21.000.000	
		1.6.2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	40	1	5.000.000	5	20.000.000	10	30.000.000	16	55.000.000	
		1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118	160	200	21.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	600	821.000.000	
		1.9	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Deaerah	100	100	100	49.500.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	329.500.000	
		1.9.1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	8	6	43.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	18	243.000.000	
		1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	3.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	63.000.000	
		1.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	22	2	3.500.000	12	10.000.000	12	10.000.000	26	23.500.000	
<b>JUMLAH</b>								<b>8.680.339.059</b>		<b>13.608.256.800</b>		<b>15.250.682.480</b>		<b>40.282.778.339</b>	

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang. Indikator kinerja tersebut mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauhmana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Penetapan indikator kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD tahun 2024-2026 seperti tercantum pada tabel di berikut ini:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

### IKU OPD (TUJUAN SASARAN)

No	Indikator Kinerja	satuan	Realisasi		Target				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	<b>IKU (Tujuan dan Sasaran OPD)</b>								
1	Kontribusi Perikanan Terhadap PDRB	%	1,33	1,34	1,26	1,35	1,35	1,35	5,31
2	Persentase peningkatan produksi perikanan	%	-	-	-	1,3	1,3	1,3	3,90
3	Kontribusi Peternakan Terhadap PDRB	%	4,23	4,17	6,04	4,18	4,19	4,2	18,61
4	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	-	-	-	3,3	3,3	3,4	10,00
5	Predikat Nilai Sakip	%	B	64,27 (B)	80 (A)	70 (B)	80 (BB)	80 (A)	80 (A)

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Kunci Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

## IKK OPD

No	Indikator Kinerja	satuan	Target Capaian Setiap Tahun ....				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
			2023	2024	2025	2026	
1	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	%	1,3	4,2	4,2	4,2	4,2
2	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	6,0	1,3	1,4	1,4	1,4
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton)	Ton	2.800	2.856	2.913	2.972	11.542
4	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton)	Ton	674	1.350	1.365	1.380	4.769
5	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	%	75	70	70	70	70
6	Jumlah Produksi daging	Kg	5.358.011	3.212.708	3.348.198	3.570.791	15.489.708
7	Jumlah produksi telur	Kg	83.362.100	54.997.045	56.822.770	58.717.333	253.899.248
8	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	21	21	21	21	21
9	Rasio Penyuluh Peternakan Terhadap Pelaku Usaha Peternakan/ Kelompok Ternak	Rasio	01:13	01:11	01:14	01:13	01:13
10	Persentase ketersediaan Prasarana Pertanian	(%)	100	-	100	100	100
11	Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan	(%)	100	100	100	100	100

INDIKATOR PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

No	Indikator Permendagri 18	Satuan	Realisasi								Target				Permasalahan (Uraikan)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
outcome	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap Dan Budidaya) Kabupaten/Kota	ton	2.320.40	3.219.90	3.275.90	2536.30	2.589.70	2804.3	1351.6	4.056,13	3.474,00	4.206,27	4.278,40	4.351,67	- Terjadinya sedimentasi dan pendangkalan - Munculnya species baru (ikan sapu-sapu)
1	Jumlah Rumah Tangga Nelayan Yang Merupakan Diversifikasi Usaha (Rtp)	%	Tidak Ada	Tidak Ada	539	408	427	415	415	415	-	-	-	-	- Kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh sebagian Rumah Tangga Nelayan sehingga menyulitkn untuk dilakukan diversifikasi usaha
2	Persentase Tempat Pendaratan Ikan Yang Operasional	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	- Tidak berfungsinya tempat pelelangan ikan dengan baik disebabkan sarana dan prasarana kurang memadai sehingga nelayan enggan mendaratkan hasil tangkapannya di TPI.
3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (Iup) Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Yang Diterbitkan	Jumlah	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	- Banyak pembudidaya ikan yang tidak memenuhi kriteria atau syarat sehingga tidak bisa diberikan Izin Usaha.
4	Jumlah Pembudidayaan Ikan Yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan (Pendidikan Dan Pelatihan/ Penyuluhan Dan Pendampingan/ Kemitraan Usaha/ Kemudahan Akses Iptek Dan Informasi/ Dan Penguatan Kelembagaan)	Jumlah	4.00	1.00	-	1.00	10.0	10	21	17	10	10	10	10	
5	Jumlah Benih Budidaya Air Tawar Dan Air Payau Yang Diproduksi	Benih	945.750	808.800	734.266	761.590	1.617.750	1.520.300	1.672.250	1.382.700	1.453.500	1.672.300	1.763.400	1.856.100	- Benih yang diproduksi kurang berkualitas.

INDIKATOR PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017

No	Indikator Permendagri 86	Satuan	Realisasi								Target				Permasalahan (Analisis)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Kontribusi Sektor Kelautan Dan Perikanan terhadap PDRB	%	1,32	1,27	1,18	1,2	1,21	1,21	1,33	1,34	1,3	1,33	1,33	1,35	
2	Produksi Perikanan	%	78,49	99,16	96,26	70,15	101,59	100	155,5	100	100	100	100	100	- Terjadinya sedimentasi dan pendangkalan - Munculnya species baru (ikan sapu-sapu)
3	Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	40,08	40	40,08	40,09	38	38	Tidak ada data	-	-	-	-	-	- Bergesernya pola konsumsi masyarakat dari produk perikanan ke produk peternakan
4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	100	68	7,41	0	32,50	-	42,86	8,57	7,14	7,14	10	12,85	- Terbatasnya alokasi anggaran untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok nelayan
5	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	78,34	81,95	81,9	82,27	79,23	83,17	100,04	94	100	100	100	100	- Minimnya sarana penangkap ikan yang memadai
6	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	ton	2320,4	3.219,90	3.257,90	2.536,30	2.589,70	2.804,30	2692,5	2.591,10	2.800,28	2.856,27	2.913,40	2.971,67	- Menurunnya produktifitas danau - Adanya species baru di danau yang mempengaruhi aktifitas penangkapan ikan.
7	Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batas Biologis Yang Aman	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	1,20	20,50	0	16,30	16,00	22,7	13,35	21	21	21	21	21	- Kurangnya anggaran untuk pembelian vaksin, obat-obatan dan operasional petugas
9	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-	-	-	-	
10	Nilai Tukar Nelayan	%	100,54	102,51	101,58	101,79	100,78	100,58	100,96	100,96	101,96	101,96	102,21	102,47	

Sustainable Development Goals (SDGs) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2018-2022

No	PILAR EKONOMI (Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)		satuan	Capaian								Target				Permasalahan (Analisis)	
	No.Indi	INDIKATOR		CP 2015	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	2023	2024	2025	2026		
1	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	%	-	-	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	%	-	52	54	55	58	57	110,9	121,9	134	134	147	161,7	+ 10 % / Thn	
3	14.b.1. (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Orang	-	-	-	156	18	-	-	-	-	-	-	-	-	Terbatasnya anggaran untuk pemberian asuransi kepada nelayan

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024 – 2026 merupakan acuan kerja bagi Dinas Peternakan dan Perikanan hingga tahun 2026 dan sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan selama 3 (tiga) tahun.

Sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian dan rencana strategis provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA Dinas Peternakan dan Perikanan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang di masa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang ini.

Pangkajene Sidenreng, 30 Maret 2023

**KEPALA DINAS**

**Ir. SEMUEL K**

NIP. 19640317 199510 1 002